

ABSTRAK

Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi rekrutmen politik calon anggota legislatif dari PPP dan PKB Kabupaten Sampang, Madura terhadap munculnya prioritas-prioritas kebijakan publik daerah pasca pemilu 2009 rendah. Argumen dasar penelitian ini adalah anggota legislatif yang direkrut partai politik diasumsikan akan memperjuangkan program-program partai yang ditawarkan semasa kampanye menjadi agenda-agenda kebijakan publik. Namun temuan menunjukkan bahwa calon di kedua partai tenggelam oleh dominasi pendekatan pencalonan model klientelistik berpusat pada ketokohan dan jaringan sosio kultural, seperti kerabat dan jaringan pribadi calon. Gejala ini berdampak pada calon terpilih di legislatif yang gagal merealisasi program-program kampanye menjadi alternatif kebijakan publik. Bahkan program-program partai yang dijanjikan pada masa kampanye belum menjadi prioritas untuk diperjuangkan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa rekrutmen politik calon anggota legislatif tidak berkontribusi terhadap munculnya agenda-agenda kebijakan publik yang seharusnya diperjuangkan calon terpilih melalui pelembagaan agenda-agenda konstituen partai.

Key words : rekrutmen politik, partai politik, pemilihan umum dan kebijakan publik.



Abstract

This research explore the significance of political recruitment for local legislatives membership of PPP and PKB in post 2009 election toward the emerging of public policy agendas in Sampang, Madura. I found that ability of both candidates to transform issues or campaign programs to public policy agendas tended low. Both party candidates tended to exploit patron- client interests such as kiai's networking and kinship factors for strengthening their political electability in their own district election than used party machine as electoral power. The dominance of patron-client caused both candidates fail to transform electoral issues to be priority of public policy that supported both parties. I found the ability of candidates and party to institutionalize the issues or campaign programs as sources of policy agendas in legislative chamber decreased by the dominance of executive's policy agendas.

Key words : political recruitment, political party, election and public policy.

